

**KONTRIBUSI PROGRAM MAJU PEREMPUAN
INDONESIA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
(MAMPU) TERHADAP PENCAPAIAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* DI INDONESIA**

Denimah

UIN Sunan Ampel Surabaya (denimahhs@gmail.com)

Rizki Rahmadini Nurika

UIN Sunan Ampel Surabaya (rr.nurika@uinsby.ac.id)

Abstrak

Kondisi perempuan di Indonesia masih belum dapat dikatakan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual dan diskriminasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013, Program Maju Perempuan Indonesia dalam Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) diluncurkan sebagai wujud kerja sama Indonesia-Australia dalam isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi Program MAMPU terhadap pencapaian SDGs di Indonesia. Ketercapaian SDGs di Indonesia melalui Program MAMPU penting untuk dikaji lebih jauh karena isu-isu tentang perempuan masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, padahal perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Beberapa penelitian terdahulu hanya sebatas melihat implementasi Program MAMPU tersebut dalam mengatasi isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, belum sampai melihat pada ketercapaian SDGs. Sedangkan, isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan memiliki efek domino terhadap isu-isu sosial lain dalam SDGs. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 SDGs, Program MAMPU telah membantu pemerintah Indonesia mencapai tujuan kesatu (tanpa kemiskinan), tujuan kedua (tanpa kelaparan), tujuan ketiga (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan kelima (kesetaraan *gender*), tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan

kesepuluh (berkurangnya kesenjangan), serta tujuan keenam belas (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).

Kata Kunci: Program MAMPU, Isu Perempuan, *Sustainable Development Goals*, Indonesia, Australia

PENDAHULUAN

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah salah satu resolusi (A/Res70/1) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Agenda ini mencakup rencana tentang dan untuk manusia, planet (bumi), kemakmuran, perdamaian dunia, dan kemerdekaan atau kebebasan.¹ Disepakati secara global oleh seluruh negara anggota PBB pada 25 September 2015, SDGs memuat 17 tujuan dan 169 target rencana aksi global yang berlaku mulai 2016 dan diharapkan dapat tercapai di tahun 2030.² Ketujuh belas tujuan tersebut meliputi tujuan kesatu (tanpa kemiskinan), tujuan kedua (tanpa kelaparan), tujuan ketiga (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan keempat (pendidikan berkualitas), tujuan kelima (kesetaraan *gender*), tujuan keenam (air bersih dan sanitasi layak), tujuan ketujuh (energi bersih dan terjangkau), tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan kesembilan (industri, inovasi, dan infrastruktur), tujuan kesepuluh (berkurangnya kesenjangan), tujuan kesebelas (kota dan pemukiman yang berkelanjutan), tujuan kedua belas (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), tujuan ketiga belas (penanganan perubahan iklim), tujuan keempat belas (ekosistem lautan), tujuan kelima belas (ekosistem daratan), tujuan keenam belas (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh), tujuan ketujuh belas (kemitraan untuk mencapai tujuan). Karena telah disepakati oleh setiap negara, maka setiap negara di dunia memiliki kewajiban moral untuk mencapai SDGs.³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi perempuan di Indonesia memang sangat jauh dari kriteria tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pada 2015, *United*

¹ “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, United Nations, diakses pada 12 Desember 2022, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

² “Apa itu SDG’s?, Sustainable Development Goals (SDG’s),” diakses pada 7 Mei 2021, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>.

³Ibid.

Nation Development Program menyatakan bahwa hanya 55% perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan formal, dibandingkan dengan laki-laki sebesar 83%.⁴ Hal ini diperkuat dengan data pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa perempuan di Indonesia mengalami hambatan hukum dan diskriminasi dalam bidang ekonomi dengan presentase 51%.⁵ Adanya permasalahan ini tentu tidak sesuai dengan SDGs nomor 1.4 yaitu semua penduduk terutama penduduk miskin dan rentan berhak mendapatkan akses sumber ekonomi yang setara dan SDGs nomor 16.3 yaitu negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses keadilan dan perangkat hukum yang sama untuk semua. Di tahun 2016, *Survey Women's Health and Life Experience* melaporkan bahwa satu dari tiga wanita usia 15-64 tahun di Indonesia, mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam hidupnya. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan ini tentu tidak sesuai dengan SDGs nomor lima, yaitu mencapai kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Permasalahan lainnya terletak pada partisipasi perempuan di bidang politik, tercatat pada tahun 2009-2014 hanya terdapat 18.04% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat.⁶ Rendahnya perwakilan perempuan di bidang politik ini tidak mencerminkan SDGs nomor 5.5 yaitu semua perempuan berhak mendapatkan berpartisipasi penuh dan kesempatan yang sama untuk memimpin di semua level pengambilan keputusan baik dalam kehidupan politik, publik, dan ekonomi. Kompleksitas isu perempuan di Indonesia juga semakin rumit karena adanya beragam budaya, agama, dan ras sehingga menciptakan kebiasaan dan pandangan hidup yang sangat berbeda. Pada tahun 2016 Indonesia berada di peringkat 105 dari 159 negara dalam indeks Ketidaksetaraan *Gender*. Hal ini menjadi bukti bahwa perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal pencapaian pendidikan, partisipasi angkatan kerja dan politik, dibandingkan dengan laki-laki. Isu kemiskinan juga menjadi salah satu latar belakang perempuan mengalami hambatan dalam memperjuangkan hak – hak nya.

Australia dan Indonesia melalui Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia

⁴"Info kit Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan (MAMPU) 2012-2020", Mampu-Bappenas, diakses pada 20 April 2021, <http://mampu.bappenas.go.id/pengetahuan/publikasi/mampu-info-kit-mei-2019/>.

⁵"Gender Equality Context in Indonesia", Equal Measures 2030, diakses pada 21 April 2021, <https://data.em2030.org/countries/indonesia/>.

⁶"Infografis: Menanti Kiprah Kartini di DPR RI", Pinter Politik, April 21, 2021, diakses pada 21 April 2021, <https://www.pinterpolitik.com/infografis/menanti-kiprah-kartini-di-dpr-ri>.

untuk Penanggulangan Kemiskinan atau *Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment*) mendukung perempuan (khususnya perempuan yang terpinggirkan) di Indonesia untuk meningkatkan kepemimpinan dan memperluas akses di segala bidang serta mendukung tercapainya SDGs yang terkait.⁷ Program ini diluncurkan pada April 2013 dengan penandatanganan *Subsidiary Arrangement* yang sudah dilengkapi dengan *design* dari Program MAMPU itu sendiri.⁸ *Design* dari Program MAMPU merupakan hasil kesepakatan dari kedua negara terkait yang telah didiskusikan sebelumnya guna memastikan bahwa program ini sesuai dengan strategi prioritas dari pembangunan nasional Indonesia. Kemitraan ini dimulai pada April 2013 dan berakhir pada Desember 2020, dibawah naungan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT Australia) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas Indonesia).

Program ini terbagi menjadi dua fase. Pada fase I (April 2013 – Juni 2016) Program MAMPU merupakan akronim dari Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan fokus ke dalam perbaikan peraturan dan layanan pemerintah yang wujudkan melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil maupun yang bergerak pada isu *gender* agar dapat meningkatkan akses perempuan miskin pada layanan publik serta mendapatkan penghidupan yang lebih baik.⁹ Lalu pada fase II (Juli 2016 – Desember 2020), Program MAMPU fokus menyempurnakan dan menguatkan kebijakan dan layanan di skala yang lebih luas dengan harapan dapat memperbesar dampak yang tercipta, agar tidak hanya meningkatkan akses perempuan miskin saja tetapi juga mendukung tercapainya kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terkait.¹⁰ Oleh karena itu, pada fase II, nama lain dari Program MAMPU adalah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan *Gender* dan Pemberdayaan Perempuan.

⁷"Tentang Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan (MAMPU) 2012-2020", Mampu-Bappenas, diakses pada 21 April 2021, <https://www.MAMPU.or.id/tentang-kami/>.

⁸Ayun, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2021.

⁹Annisa Bunga Damayanti, "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

¹⁰"Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program MAMPU Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan Fase II", Kementerian PPN/Bappenas, diakses pada 24 April 2021, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-MAMPU-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/>.

Fokus Program MAMPU pada fase II adalah salah satunya yaitu mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terkait.¹¹ Untuk mendukung tercapainya SDGs, Program MAMPU mengembangkan sejumlah pendekatan terhadap lima area tematik yaitu, meningkatkan akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah, meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja, meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan, dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan.¹² Dari kelima area tematik tersebut, penulis berargumentasi bahwa Program MAMPU nantinya tidak hanya akan berkontribusi pada pencapaian SDGs tujuan kelima (kesetaraan *gender*), tetapi juga pada SDGs yang lain seperti tujuan ketiga (kehidupan sehat dan sejahtera) dan tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Program MAMPU. *Pertama*, skripsi yang disusun oleh Desi Annisa Putri pada tahun 2019 dengan judul “Kerjasama Australia-Indonesia melalui Program MAMPU dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia (2014-2018)”. *Kedua*, skripsi yang disusun oleh Annisa Bunga Damayanti pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gender di Indonesia”. *Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Lindie Rutry Wurangian pada tahun 2017 dengan judul “*Indonesia-Australia Development Cooperation in Reducing Poverty by Empowering Women in Indonesia: A Case Study of Empowering Women for Poverty Reduction or Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Program (2012-2015)*”. *Keempat*, skripsi yang disusun oleh Julita Silaban pada tahun 2017 dengan judul “Kemitraan Indonesia-Australia melalui Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) untuk Pemberdayaan Perempuan”. *Kelima*, skripsi yang disusun oleh ST. Nasira B pada tahun 2017 dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program MAMPU (Studi Kasus di Yayasan LP2EM Kota Parepare). Secara garis besar, kelima penelitian terdahulu tersebut memang

¹¹“Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program MAMPU Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan Fase II”, Kementerian PPN/Bappenas, diakses pada 24 April 2021, <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/>.

¹²“Tentang Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan (MAMPU) 2012-2020”, Mampu-Bappenas, diakses pada 4 Mei 2021, <https://www.mampu.or.id/tentang-kami/>.

telah membahas Program MAMPU dalam kaitannya dengan isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi, belum ada satu pun penelitian terdahulu yang mengaitkan Program MAMPU dengan SDGs. Padahal, isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan memiliki efek domino terhadap isu-isu sosial lainnya dalam SDGs seperti kemiskinan dan kesehatan. Sehingga, kontribusi Program MAMPU terhadap pencapaian SDGs Indonesia menjadi menarik untuk diteliti.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Tujuannya adalah untuk dapat menghasilkan gambaran yang runtut, akurat, dan faktual terkait fakta tentang perkembangan UMKM di Jawa Timur pasca implementasi *ASEAN Economic Community* (AEC). Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah kelompok karena subyek penelitiannya adalah para UMKM di Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara maupun dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan, yaitu Koordinator Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas), Koordinator *Project* MAMPU dari PEKKA, Direktur Institut Kapal Perempuan, Wakil Direktur Institut Kapal Perempuan, Direktur Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), *Data and Publication Officer Migrant Care*, Konsorium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU) dan Direktur *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM). Sementara untuk dokumentasi dilakukan dengan menggunakan buku, artikel, berita cetak maupun *online*, jurnal, *policy brief*, *annual report*, dan video, baik yang didapatkan secara luring maupun daring.

HASIL PENELITIAN

Ketercapaian SDGs di Indonesia

Di Indonesia, SDGs dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sejak ditandatangani pada September 2015, SDGs dibagi atau dikelompokkan kedalam empat pilar yaitu pembangunan sosial yang mencakup tujuan satu hingga lima, pembangunan ekonomi yang mencakup tujuan tujuh hingga sembilan dan tujuh belas,

pilar pembangunan lingkungan yang mencakup tujuan enam dan sebelas hingga lima belas, dan yang terakhir pembangunan hukum dan tata kelola yang berisi tujuan enam belas.

Untuk mendukung implementasi nya, SDGs telah disinergikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.¹³ Selain itu juga telah terdapat dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan SDGs yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada Juli 2017, Indonesia pertama kali melaporkan *Voluntary National Review* mengenai SDGs dalam *High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development*. Forum ini diadakan sebanyak dua tahun sekali dengan tujuan untuk menyajikan gambaran tentang posisi negara dalam implementasi SDGs. Forum ini diharapkan dapat membantu mempercepat pencapaian SDGs melalui berbagi pengalaman, mengidentifikasi kesenjangan dan praktik yang baik, dan memobilisasi kemitraan. HLPF SDGs 2017 mengusung tema “*Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*”. Pada forum ini, Indonesia berhasil memaparkan beberapa pencapaian terkait tujuan satu, dua, tiga, lima, sembilan, empat belas, dan tujuh belas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2017

Tujuan SDGs	Pencapaian
Tujuan 1	✓ Indonesia mengalami kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dengan berhasil menurunkan persentase masyarakat kemiskinan dari 17,75% (2006) menjadi 10,70% (2016). ✓ Tingkat kemiskinan yang diukur dengan <i>Parity Purchasing Power</i> (PPP) sebesar USD 1,25 per kapita/hari (World Bank), menurun dari 28,32% pada tahun 2006 menjadi sekitar 8,80% pada tahun 2015.
Tujuan 2	✓ <i>Stunting</i> pada anak dibawah lima tahun menurun menjadi 33,6% (2016) dari 37,2% (2013). Dan pada anak dibawah dua tahun,

¹³ “Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World (2017), The Minister of National Development Planning, diakses pada 6 Mei 2021, <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/VNR%20Indonesia%20for%20HLPF%202017.pdf>.

	menurun dari 32,9% (2013) menjadi 26,1% (2016). ✓ Kualitas konsumsi pangan di Indonesia semakin membaik yang ditunjukkan dengan semakin tingginya <i>Desirable Dietary Pattern</i> (DDP) dari 75,7 (2009) menjadi 85,2 (2015).
Tujuan 3	✓ Berdasarkan <i>Annual Paracite Incidence</i> (API), angka kesakitan malaria mengalami penurunan dari 1,75 (2011) menjadi 0,85 per 1.000 penduduk (2015). ✓ Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas menunjukkan presentase persalinan di fasilitas kesehatan meningkat sebanyak 79,70% (2016) dari 77,60% (2015).
Tujuan 5	✓ Persentase wanita (20-24 tahun) yang menikah pertama kali sebelum usia 15 tahun kurang dari 1% pada tahun 2015. ✓ Data pendidikan mengemukakan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di tingkat sekolah menengah telah tercapai. Dibuktikan dengan seimbangnya <i>Gross Enrollment Rate</i> antara Perempuan dan Laki-laki.
Tujuan 9	✓ Jalanan stabil nasional juga meningkat dari 82,27% pada tahun 2010 menjadi 94% pada tahun 2014. ✓ Pembangunan jalur kerta api meningkat 95% pada tahun 2011-2015. ✓ Jumlah pelabuhan meningkat dari 1.652 perlabuhan pada 2013 menjadi 1.739 pada tahun 2014.
Tujuan 14	✓ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/2014 telah menetapkan 11 WPP untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. ✓ Hasil Berkelanjutan Maksimum pada Perikanan telah ditingkatkan sebanyak 0.8 dari tahun 2011 sebanyak 6.5 juta ton ke tahun 2014.
Tujuan 17	✓ Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, seperti yang tertuang dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. ✓ Di Indonesia, telah terdapat lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan data statistik untuk indikator SDGs dan mengembangkan database indikator SDGs Indonesia yaitu Badan Pusat Statistik.

Sumber: "Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World (2017), The Minister of National Development Planning, diakses pada 6 Mei 2021, <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/VNR%20Indonesia%20for%20HLPF%202017.pdf>.

Dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019, Indonesia kembali memaparkan VNR. HLPF SDGs 2019 mengusung tema "*Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*", Indonesia menyorot beberapa tujuan sesuai dengan tema tersebut yaitu tujuan

nomor empat, delapan, sepuluh, tiga belas, enam belas, dan tujuh belas.

Tabel 2. Daftar Pencapaian SDGs di Indonesia tahun 2019

Tujuan SDGs	Pencapaian
Tujuan 4	✓ Pada tahun 2015-2018, tingkat kehadiran pada taman kanak kanak meningkat dari 79.4% menjadi 83.3%. Presentase pendaftaran pada Sekolah Menengah Pertama meningkat dari 91,17% menjadi 91,52%. Lalu Sekolah Menengah Atas meningkat dari 78,02% menjadi 80,68%. Dan pada Perguruan Tinggi meningkat dari 25,26% menjadi 30,19%. ✓ Ketidaksetaraan gender di bidang Pendidikan hamper tidak ada. Khususnya akses pada SD dan SMP hamper setara di semua kelompok pendapatan.
Tujuan 8	✓ Pada 2015-2018 jumlah pengangguran menurun dengan jumlah pengangguran perempuan dari 6,4% menjadi 5,3% dan terdapat 9,38 juta lapangan pekerjaan telah dibentuk. ✓ Di tahun 2014-2017, keuangan inklusif meningkat dari 36% menjadi 49% dengan akses keuangan bagi masyarakat miskin meningkat dari 22% menjadi 37%.
Tujuan 10	✓ Indonesia telah melakukan inovasi instrumen keuangan beberapa diantaranya yaitu <i>Green Sukuk</i>, keuangan campuran, <i>Islamic Chartity</i>. Dampak sosial dari adanya investasi, telah mempengaruhi dan memanfaatkan aliran sumber daya publik dan swasta untuk pembiayaan SDGs. ✓ <i>SDGs Financing Hub</i> telah didirikan untuk menerapkan sumber pembiayaan yang variatif melalui kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan dan untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan.
Tujuan 13	✓ Emisi gas rumah kaca berkurang 22,5% dari akumulasi <i>baseline</i> sebesar 13 miliar ton CO₂e, dan intensitasnya sebesar 27% dari <i>baseline</i> sebesar 560ton CO₂e per miliar rupiah dalam kurun waktu tahun 2010-2017. ✓ Peningkatan manajemen bencana telah mengurangi jumlah kematian dan orang hilang dengan penurunan kerugian ekonomi langsung sebesar 7 triliun rupiah (2010-2017) dan Indeks Risiko Bencana telah berkurang 23,97% (2018).
Tujuan 16	✓ Index Demokrasi Indonesia meningkat dari 70,9 (2016) ke 72,11

	(2017). ✓ Index Sikap Anti Korupsi Indonesia meningkat dari 3,59 (2015) ke 3,66 (2018).
Tujuan 17	✓ Parlemen Indonesia telah terlibat sejak tahap awal konseptualisasi SDGs, sedangkan BPK terlibat dalam mengaudit persiapan dan pelaksanaan SDGs. ✓ Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular telah dibentuk dan diperkuat dengan perluasan negara mitra dan melingkupi hubungan antara perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan.

Sumber: "Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World (2017), The Minister of National Development Planning, diakses pada 6 Mei 2021, <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/VNR%20Indonesia%20for%20HLPF%202017.pdf>.

Dari beberapa pencapaian yang dipaparkan dalam VNR 2017 dan 2019, dapat diketahui bahwa Indonesia belum memperhatikan isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan *gender* secara maksimal. Fakta lapangan memperlihatkan bahwa banyak permasalahan perempuan dan kesetaraan *gender* yang masih belum bisa diatasi oleh Pemerintah Indonesia misalnya, tingginya angka *unmet need*, angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang cenderung naik, kekosongan hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan turunnya partisipasi perempuan di DPR sebagai pemangku kebijakan di tingkat nasional.

Realisasi Program MAMPU Fase II

Kerjasama Australia-Indonesia dalam Program MAMPU fase II dibagi menjadi lima area tematik. *Pertama*, meningkatkan akses terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah. Program MAMPU bersama mitra nasionalnya yaitu Institut KAPAL Perempuan, Yayasan PEKKA, dan KPI serta didukung oleh jaringan dari ketiga organisasi tersebut, mengembangkan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah mengembangkan Sekolah Perempuan dan *Gender Watch*. Sekolah Perempuan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pemikiran kritis dan peningkatan kesadaran, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran lainnya yang terkait sehingga peserta Sekolah Perempuan dapat menjadi pemimpin perubahan sosial di

lingkungan mereka.¹⁴ Sedangkan *Gender Watch* merupakan program pemantauan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) yang melibatkan tiga aktor yaitu perempuan miskin (sebagai penerima manfaat program), pemerintah, dan masyarakat sipil seperti akademisi, pers, dan atau perwakilan organisasi kemasyarakatan.¹⁵ Selain itu juga ada kegiatan KLIK PEKKA. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) bersama Program MAMPU mengembangkan sebuah Program yang bernama KLIK (Klinik Layanan dan Informasi) PEKKA. KLIK PEKKA menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan mengenai kartu identitas, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, dan kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Kegiatan lainnya yaitu PIPA-JKN. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi bersama Program MAMPU mengembangkan sebuah inisiatif bernama Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi JKN (PIPA-JKN) untuk mengawasi akses perempuan terhadap program pemerintah yaitu JKN.

Kedua, meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja. Pada area tematik ini, Program MAMPU bersama empat mitranya yaitu Yayasan Anisa Swasti (YASANTI), *Trade Right Union Center* (TRUC), dan Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), berfokus pada pemenuhan hak bagi para perempuan pekerja rumahan. Perempuan pekerja rumahan ialah perempuan yang bekerja di perusahaan atau berada di bawah seorang majikan, namun pekerjaannya dikerjakan di rumah, kemudian diserahkan lagi kepada perusahaan atau majikan tersebut.¹⁷ Mereka terlibat dalam pekerjaan seperti membuat sepatu, menyulam, menjahit pakaian, melinting rokok, dan membuat perhiasan.

Ketiga, meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Di area tematik ini, hanya terdapat satu Mitra Nasional MAMPU yaitu *Migrant Care*. Program MAMPU bersama *Migrant Care* berfokus pada perlindungan para perempuan pekerja migran termasuk keluarganya. *Migrant Care* bersama Program MAMPU membentuk Desa

¹⁴“Mampu Brief Project: Sekolah Perempuan”, Bappenas-Mampu, diakses pada 20 Juni 2021, <https://www.mampu.or.id/pengetahuan/publikasi/project-brief-sekolah-perempuan/>.

¹⁵ Misiyah, wawancara oleh penulis, 02 Juni 2021.

¹⁶“Latar Belakang”, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), diakses pada 21 Juni 2021, <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.

¹⁷ Amin Muftiyanah, wawancara oleh penulis, 18 Juni 2021.

Peduli Buruh Migran (DESBUMI) pada tahun 2013.¹⁸ DESBUMI dibangun guna mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migrant khususnya perempuan sejak dari desa.

Keempat, meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan. Program MAMPU bersama tiga mitra nasionalnya yaitu PERMAMPU, Aisyiyah, dan YKP mengembangkan beberapa program yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi perempuan. Di antaranya adalah dengan menginisiasi Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) yang bertujuan untuk mengedukasi para perempuan tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara. Aisyiyah yang telah bekerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), juga mendorong mereka untuk merespon isu tersebut. BSA juga berhasil meningkatkan akses perempuan terhadap layanan pemeriksaan Pap Smear, tes IVA, serta pemeriksaan kanker payudara. Selain itu juga ada Advokasi HKSR dan Gizi Perempuan. PERMAMPU melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan *Credit Union*. Melalui kelompok ini, kemudian mereka menyuarakan dan memperhatikan mengenai Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) di Puskesmas setempat melalui aksi kolektif yang disebut dengan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumpun.

Kelima, mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Selama dua belas tahun terakhir, angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) cenderung naik. Oleh karena itu pengurangan KtP adalah permasalahan yang sangat krusial di Indonesia. Program MAMPU bersama Mitra Nasionalnya yaitu FPL, Komnas Perempuan, dan Yayasan BaKTI mengembangkan program dan layanan guna melindungi dan mendampingi para perempuan korban kekerasan. Di antaranya yaitu SPPT-PKKTP. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) adalah salah satu program kolaborasi antara Komnas Perempuan dan FPL, termasuk *Legal Resource Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). SPPT-PKKTP mengintegrasikan antara sistem peradilan pidana dengan pemulihan korban kekerasan. Jadi terdapat koordinasi yang telah disepakati dalam bentuk MoU, antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, kanwil kementerian, dan lembaga eksekutif (gubernur)) dengan lembaga advokasi.¹⁹ Selanjutnya, terdapat

¹⁸ Evi Zulyani, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2021.

¹⁹ Nur Laila Hafidhoh, wawancara oleh penulis, 24 Juni 2021.

Kelompok Konstituen dan Reses Partisipatif yang merupakan hasil program dari kemitraan Program MAMPU dan BaKTI. Kelompok Konstituen merupakan organisasi masyarakat akar rumput yang membela berbagai macam hak perempuan termasuk pengurang KtP. Dari Kelompok Konstituen ini kemudian BaKTI mengembangkan program Reses Partisipatif yang merupakan sebuah forum yang melibatkan Kelompok Konstituen dan perlemen daerah untuk duduk bersama merumuskan kebijakan.²⁰ Di dalam forum ini, Kelompok Konstituen bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang berasal dari akar rumput dapat direspon dengan baik dari parlemen daerah. Dalam area tematik ini, Program MAMPU mendukung Yayasan BaKTI dengan meningkatkan kerjasama dengan badan *legislative* di delapan puluh lima desa/kelurahan di tujuh kabupaten/kota di lima provinsi di Indonesia. Hingga saat ini, Reses Partisipatif sedang direplikasi oleh FPL. Selain itu juga ada advokasi kebijakan bersama Komnas Perempuan. Program MAMPU mendukung Komnas Perempuan untuk bekerja sama dengan Mitra MAMPU lainnya guna mengumpulkan data, pengalaman, dan bukti dari akar rumput untuk membantu mengadvokasi Undang Undang yang pro terhadap perempuan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Seksual. UU tersebut diharapkan bisa mengisi kekosongan hukum dan peraturan yang ada melalui perluasan arti dan klausul yang lebih melindungi hak-hak korban dan penyintas kekerasan seksual.²¹

PEMBAHASAN

Salah satu tujuan dari Program MAMPU fase II adalah untuk mendukung tercapainya SDGs.²² SDGs sendiri mencakup 17 tujuan dengan 169 target yang komprehensif dan detil, oleh karena itu kontribusi Program MAMPU dengan SDGs dapat dipetakan dengan melihat korelasi antara realisasi Program MAMPU dengan 169 target SDGs yang ada.

²⁰ "Program MAMPU", Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, diakses pada 27 Juni 2021, <https://www.mampu.or.id/mitra-kami/yayasan-bakti-bursa-pengetahuan-kawasan-timur-indonesia/>.

²¹ "Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2012-2020", Mampu-Bappenas, diakses pada 18 Juni 2021, <http://mampu.bappenas.go.id/>.

²² Ayun, wawancara oleh penulis, 25 Juni 2021.

Tabel 3. Kontribusi Program MAMPU Area Tematik 1 terhadap SDGs

Realisasi Program MAMPU	SDGs yang Tercapai
• PIPA-JKN • KLIK PEKKA • Sekolah Perempuan • <i>Gender Watch</i> • Advokasi kebijakan	Tujuan 1
	Tujuan 3
	Tujuan 5
	Tujuan 10
	Tujuan 16

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Tabel 4. Kontribusi Program MAMPU Area Tematik 2 terhadap SDGs

Realisasi Program MAMPU	SDGs yang Tercapai
• Kelompok Pekerja Rumahan • Jaringan Pekerja Rumahan Nasional • Advokasi kebijakan/peraturan	Tujuan 1
	Tujuan 5
	Tujuan 8
	Tujuan 16

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Tabel 5. Kontribusi Program MAMPU Area Tematik 3 terhadap SDGs

Realisasi Program MAMPU	SDGs yang Tercapai
• DESBUMI • Advokasi kebijakan/peraturan	Tujuan 1
	Tujuan 5
	Tujuan 8
	Tujuan 16

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Tabel 6. Kontribusi Program MAMPU Area Tematik 4 terhadap SDGs

Realisasi Program MAMPU	SDGs yang Tercapai
• Pusat pengaduan BPJS-Kesehatan • Balai Sakinah Aisyiyah • <i>One Stop Service and Learning</i> • <i>Credit Union</i> dan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput • Advokasi kebijakan/peraturan	Tujuan 1
	Tujuan 2
	Tujuan 3
	Tujuan 5
	Tujuan 16

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Tabel 7. Kontribusi Program MAMPU Area Tematik 5 terhadap SDGs

Realisasi Program MAMPU	SDGs yang Tercapai
• SPPT-PKKTP • Monitoring dan Kampanye HAM • Kelompok Konstituen • Reses Partisipatif • Advokasi Kebijakan	Tujuan 1
	Tujuan 5
	Tujuan 16

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Dari beberapa tabel tersebut dapat diketahui bahwa Program MAMPU ternyata memang tidak hanya berkontribusi pada SDGs isu perempuan dalam tujuan kelima (kesetaraan *gender*) saja, tetapi juga pada SDGs isu-isu yang lain, yaitu tujuan pertama (tanpa kemiskinan), tujuan kedua (tanpa kelaparan), tujuan ketiga (kehidupan sehat dan sejahtera), tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan kesepuluh (berkurangnya kesenjangan), dan tujuan keenam belas (perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh). Hal ini dapat diartikan bahwa Program MAMPU melalui program kerjanya dapat membantu tercapainya SDGs di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020.

Selain terdiri dari tujuan dan target, SDGs juga memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya yaitu *Universal Value* yang mencakup *Human Rights Based Approach (HRBA)*, *Leave No One Behind (LNOB)*, dan *Gender Equality and Women Empowerment*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Program MAMPU yang merupakan sebuah kerja sama yang memang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan *gender*. Dalam berkegiatan dan pelaksanaan program kerjanya, Program MAMPU bersama para mitra juga menggunakan pendekatan HAM (HRBA) dimana para mitra MAMPU terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat tanpa memandang ras, suku, budaya, dan agama (LNOB).

KESIMPULAN

Berdasarkan data capaian SDGs di Indonesia pada tahun 2017 dan 2019, SDGs pada isu-isu kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan masih belum tercapai secara optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia kemudian menjalin kerja sama dengan Australia dan menghasilkan Program MAMPU. Program MAMPU direalisasikan

melalui sejumlah kegiatan dalam lima area tematik. *Pertama*, meningkatkan akses terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah. Kegiatan dalam area tematik pertama memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs tujuan pertama, ketiga, kelima, kesepuluh, dan keenam belas. *Kedua*, meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja. Kegiatan dalam area tematik kedua memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs tujuan pertama, kelima, kedelapan, dan keenam belas. *Ketiga*, meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Kegiatan dalam area tematik ketiga memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs tujuan pertama, kelima, kedelapan, dan keenam belas. *Keempat*, meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan. Kegiatan dalam area tematik keempat memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs tujuan pertama, kedua, ketiga, kelima, dan keenam belas. *Kelima*, mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan dalam area tematik kelima memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs tujuan pertama, kelima, dan keenam belas.

REFERENSI

- Ayun. Wawancara oleh penulis. Dilaksanakan pada 25 Juni 2021.
- Bappenas-Mampu, "Mampu Brief Project: Sekolah Perempuan", diakses pada 20 Juni 2021, <https://www.mampu.or.id/pengetahuan/publikasi/project-brief-sekolah-perempuan/>.
- Damayanti, Annisa. "Implementasi Program MAMPU sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis *Gender* di Indonesia", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Equal Measures 2030, "Gender Equality Context in Indonesia", diakses pada 21 April 2021, <https://data.em2030.org/countries/indonesia/>.
- Hafidhoh, Nur Laila. Wawancara oleh penulis. Dilaksanakan pada 24 Juni 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas, "Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program MAMPU Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan Fase II", diakses pada 24 April 2021, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-MAMPU-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/>.
- Kementerian PPN/Bappenas, "Penandatanganan Subsidiary Arrangement Program MAMPU Kemitraan Australia dan Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan Fase II", diakses pada 24 April 2021, <https://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitran-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/>.
- Mampu-Bappenas, "Info kit Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan (MAMPU) 2012-2020", diakses pada 20 April 2021, <http://mampu.bappenas.go.id/pengetahuan/publikasi/mampu-info-kit-mei-2019/>.

- Misiyah. Wawancara oleh penulis. Dilaksanakan pada 02 Juni 2021.
- Mampu-Bappenas,”Tentang Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan (MAMPU) 2012-2020”, diakses pada 21 April 2021, <https://www.MAMPU.or.id/tentang-kami/>.
- Muftiyanah, Amin. Wawancara oleh penulis. Dilaksanakan pada 18 Juni 2021.
- Pinter Politik, “Infografis: Menanti Kiprah Kartini di DPR RI”, April 21, 2021, diakses pada 21 April 2021, <https://www.pinterpolitik.com/infografis/menanti-kiprah-kartini-di-dpr-ri>.
- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA),”Latar Belakang”, diakses pada 21 Juni 2021, <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.
- Sustainable Development Goals (SDG’s),”Apa itu SDG’s?”, diakses pada 7 Mei 2021, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>.
- The Minister of National Development Planning, “Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World (2017), diakses pada 6 Mei 2021, <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/VNR%20Indonesia%20for%20HLPF%202017.pdf>.
- United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, diakses pada 12 Desember 2022, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, “Program MAMPU”, diakses pada 27 Juni 2021, <https://www.mampu.or.id/mitra-kami/yayasan-bakti-bursa-pengetahuan-kawasan-timur-indonesia/>.
- Zulyani, Evi. Wawancara oleh penulis. Dilaksanakan pada 24 Juni 2021.